

BUKU 2
PETUNJUK PELAKSANAAN SELEKSI LOKASI
DRAINASE BERBASIS MASYARAKAT



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud	1
1.3 Tujuan	2
1.4 Sasaran	2
1.5 Kedudukan Buku-2 Dalam Pedoman Umum DBM Secara Keseluruhan	2
1.6 Lingkup Pembahasan	2
BAB II TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI LOKASI	4
BAB III KRITERIA LOKASI	7
3.1 Kriteria Umum Calon Lokasi	7
3.2 Kriteria Teknis	7
3.3 Kriteria Masyarakat	7
BAB IV PROSEDUR PEMILIHAN LOKASI	9
4.1 Tata Cara Pengusulan Lokasi	9
4.2 Tata Cara Seleksi Lokasi	10

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tugas dan Tanggung Jawab Stakeholder pada Tahap Seleksi Lokasi	4
-----------	----------------------------------------------------------------------	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kedudukan Buku-2 Petunjuk Pelaksanaan Seleksi Lokasi dalam Pedoman Umum DBM	3
Gambar 2.1	Alur Pelaksanaan Seleksi Lokasi	6

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Proposal/Usulan Masyarakat Untuk Perbaikan Drainase	11
Lampiran 2. Panduan Pelaksanaan Community Self-Selection Stakeholders Meeting (CSSM).....	12
Lampiran 3. Berita Acara Pelaksanaan Proses Seleksi Lokasi Drainase BerbasisMasyarakat (DBM).....	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa penanganan drainase adalah untuk mengurangi genangan air dan mengatasi kemungkinan terjadinya banjir di suatu lokasi. Drainase Berbasis Masyarakat (DBM) bertujuan untuk mengurangi masalah kemungkinan genangan dan banjir di lokasi atau wilayah permukiman perkotaan dengan mengutamakan partisipasi atau peran serta masyarakat.

Tujuan dari peran sertadan pelibatan masyarakat adalah agar sarana dan prasarana drainase yang dibangun dapat lebih berkelanjutan, berumur panjang, dioperasikan dan dipelihara dengan baik dan benar oleh masyarakat, sehinggapelibatan masyarakat harus dimulai sejak dari tingkat gagasan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan serta evaluasinya.

Seleksi atau pemilihan lokasi merupakan salah satu titik kritis (*critical point*) yang dapat mempengaruhi berhasil dan tidaknya suatu program, termasuk program Drainase Berbasis Masyarakat (DBM). Pemilihan lokasi yang tidak tepat juga dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan DBM nantinya. Hal ini umumnya disebabkan karenacara penentuan lokasi yang tidak tepat. Akibatnya, justru lokasi yang tidak membutuhkan yang mendapatkan program, sedangkan yang benar-benar membutuhkan sarana drainase justru tidak memperoleh.

Buku 2 (dua) ini merupakan buku panduan untuk melakukan seleksi lokasi, dimana sesuai dengan prinsip pemberdayaan masyarakat, dalam seluruh proses tahapan pelaksanaannya harus dapat melibatkan partisipasi atau peran serta masyarakat semaksimal mungkin agar ada *sense of belonging*, atau rasa memiliki, masyarakat terhadap program atau kegiatan yang dilaksanakan.

1.2. Maksud

Buku ini dimaksudkan sebagai panduan bagi para stakeholders atau pemangku kepentingan termasuk pelaku dan pengelola program drainase berbasis masyarakat,

utamanya pemerintah kabupaten/kota, dalam hal ini dinas penanggungjawab, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun tenaga fasilitator lapangan (TFL). Buku panduan ini juga dapat digunakan sebagai alat ukur progres pekerjaan DBM.

1.3. Tujuan

Secara umum, tujuan dari kegiatan seleksi lokasi adalah agar diperoleh lokasi yang tepat, layak secara teknis maupun sosial untuk pelaksanaan program Drainase Berbasis Masyarakat (DBM). Lokasi yang lolos seleksi benar-benar merupakan lokasi yang menghadapi masalah genangan air dan banjir, serta masyarakat bersedia untuk mengelola sarana drainasenya secara berkelanjutan apabila sudah dibangun.

1.4. Sasaran

Sasaran dari buku ini adalah:

- Dinas penanggungjawab
- Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD)
- Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)

1.5. Kedudukan Buku-2 Dalam Pedoman Umum DBM Secara Keseluruhan

Kedudukan Buku 2 Petunjuk Pelaksanaan Seleksi Lokasi, merupakan bagian dari satu kesatuan Pedoman Umum Drainase Berbasis Masyarakat, yang saling terkait satu sama lain sehingga masing-masing mempunyai fungsi tersendiri dan bersifat komplementer.

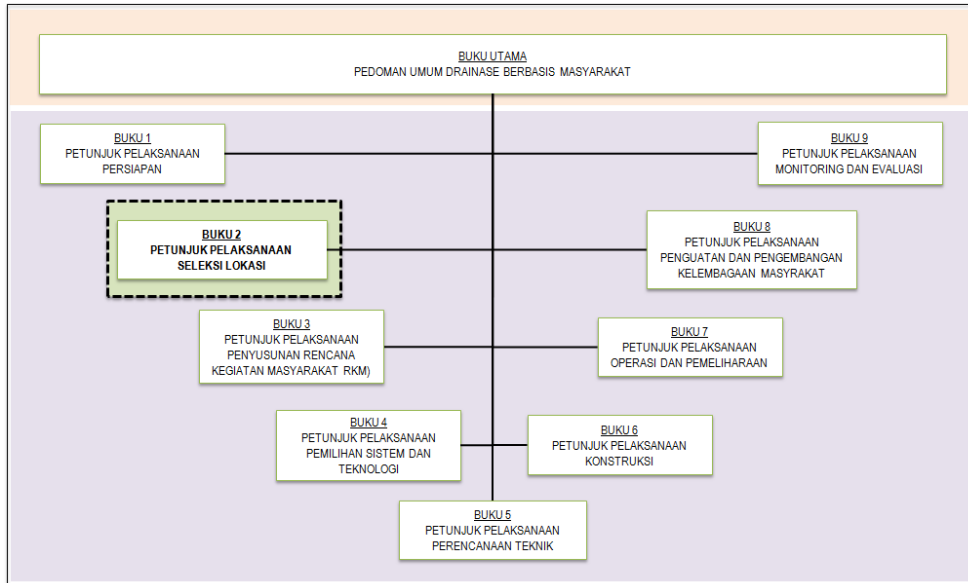
Secara sederhana keterkaitan tersebut digambarkan pada Gambar berikut ini :

1.6. Lingkup Pembahasan

Pembahasan Buku Petunjuk Pelaksanaan Seleksi Lokasi (Buku-2) meliputi:

1. Ketentuan dan Tahapan Pelaksanaan Seleksi Lokasi;
2. Kriteria lokasi;
3. Cara penentuan calon lokasi;

4. Proses seleksi lokasi;
5. Pendekatan partisipatif dalam seleksi lokasi.

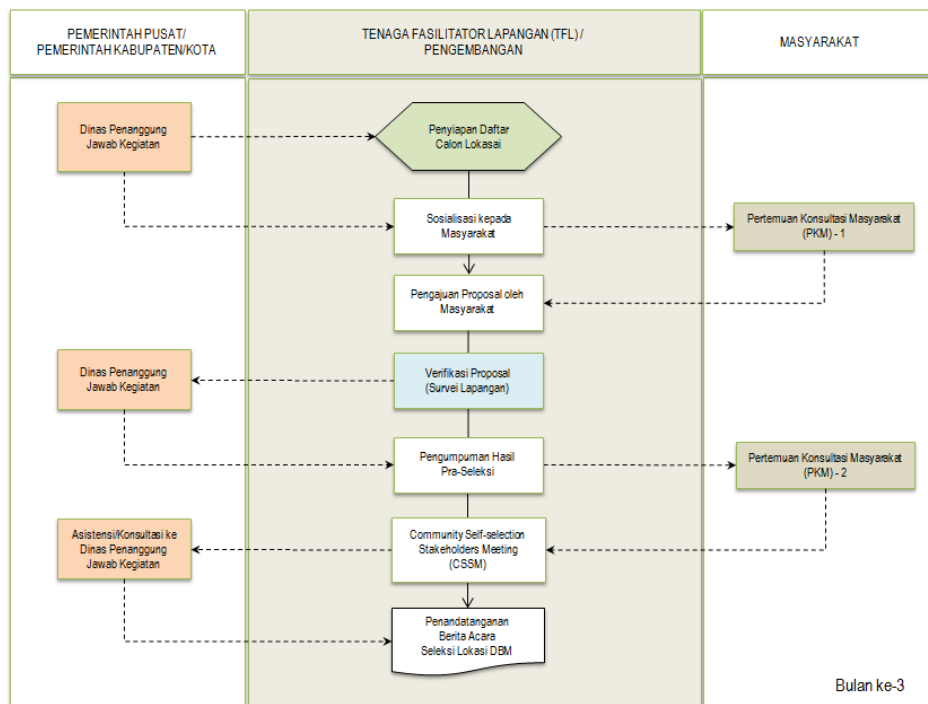


Gambar 1-1 : Kedudukan Buku 2 Petunjuk Pelaksanaan Seleksi Lokasi

BAB II

TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI LOKASI

Sesuai dengan ruang lingkup dalam kegiatan seleksi lokasi untuk Drainase Berbasis Masyarakat (DBM) maka tahapan-tahapan kegiatan yang akan dilakukan dapat dilihat pada bagan alir berikut ini:



Gambar 2-1 : Alur Pelaksanaan Seleksi Lokasi

Bagan alir di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Pemerintah kabupaten/kota, dalam hal ini dinas penanggungjawab, menyusun daftar calon lokasi DBM berdasarkan hasil analisa peta genangan;

- (2) Dinas penanggungjawab dibantu oleh tenaga fasilitator lapangan (TFL) melakukan sosialisasi kepada stakeholder masyarakat tentang rencana program DBM;
- (3) Pengajuan proposal/usulan dari masyarakat ke dinas penanggungjawab;
- (4) Dinas penanggungjawab melakukan verifikasi proposal sesuai kriteria dengan cara survey lokasi;
- (5) Membuat dan mengirimkan surat pemberitahuan kepada lurah/kepala desa perihal pertemuan stakeholder masyarakat untuk seleksi lokasi secara partisipatif dan cepat;
- (6) Pelaksanaan CSSM (*Community Self-selection Stakeholder Meeting*) atau seleksi masyarakat oleh masyarakat sendiri dengan difasilitasi oleh tenaga fasilitator lapangan (TFL). Namun, apabila calon lokasi hanya ada 1 (satu) calon maka tidak perlu dilakukan CSSM;
- (7) Membuat Berita Acara seleksi lokasi DBM yang ditandatangani oleh semua stakeholder setelah dilakukan proses seleksi sebagai dokumen seleksi, sekaligus sebagai laporan kepada dinas.

Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terkait dalam tahapan dan proses kegiatan seleksi adalah sebagai berikut:

No.	Tahap Kegiatan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Kab./Kota	TFL	Masyarakat
1.	Daftar calon lokasi DBM	Monitoring	-Analisa peta genangan - Membuat daftar calon lokasi	- Membantu melakukan survey lapangan	- Memberikan informasi
2.	Sosialisasi kepada masyarakat	Monitoring	-Mengundang masyarakat - Menyedian tempat dan konsumsi pertemuan	- Memberikan pemaparan program DBM	- Menanyakan hal penting
3.	Pengajuan & Verifikasi proposal	Monitoring	- Menerima dan mengadministrasikan - Melakukan verifikasi dan mengumumkan hasil verifikasi	- Membantu masyarakat menyusun proposal	- Menyiapkan berbagai informasi penting
4.	CSSM	Monitoring	- Supervisi kegiatan dan memberikan motivasi kepada masyarakat	- Memfasilitasi masyarakat dalam mengikuti proses CSSM	- Berpartisipasi aktif
5.	Berita Acara Seleksi Lokasi	Monitoring	- Menandatangani berita acara	- Menandatangani berita acara	- Menandatangani berita acara

Tabel 2-2 : Tugas dan Tanggung Jawab Stakeholder pada Tahap Seleksi Lokasi

BAB III

KRITERIA LOKASI

3.1. Kriteria Umum Calon Lokasi

Sebagaimana sudah disampaikan dalam buku Pedoman Umum, kriteria umum calon lokasi DBM adalah sebagai berikut:

1. Batas hidrolis mencakup satu wilayah tangkapan air (*catchment area*).
2. Wilayah layanan Drainase Berbasis Masyarakat (DBM) dapat dikembangkan dengan sistem drainase lokal
3. Prioritas pengembangan Drainase Berbasis Masyarakat (DBM) diarahkan pada wilayah permukiman perkotaan.
4. Lokasi sudah masuk/tercantum dalam dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK)

3.2. Kriteria Teknis

Adapun secara teknis, calon lokasi DBM harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Sudah ada sarana pengolahan air limbah dan pengelolaan sampah di lokasi untuk menghindari pembuangan tinja dan sampah ke saluran drainase atau polder maupun kolam retensi.
2. Ada permasalahan genangan dengan ketinggian air mencapai lebih dari 30 cm dan lama genangan lebih dari 2 jam.
3. Tersedia lahan untuk membangun prasarana dan sarana drainase
4. Pembebasan lahan dapat diminimalisasi
5. Ada saluran sub-sistem atau sistem drainase untuk menampung limpasan air

3.3. Kriteria Masyarakat

Di samping kriteria umum dan kriteria teknis yang telah disebutkan di atas, agar calon lokasi DBM benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan masyarakat siap untuk mengelola, maka kriterianya adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat berminat untuk mengatasi masalah genangan air atau banjir.
2. Masyarakat pernah melaksanakan kegiatan gotong-royong warga untuk perbaikan infrastruktur lingkungan.
3. Masyarakat memiliki lembaga atau kelompok yang berbasis keswadayaan dan berumur cukup lama.
4. Penanganan masalah genangan air atau banjir merupakan prioritas program bagi masyarakat.
5. Masyarakat bersedia membayar iuran untuk pembangunan serta operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase.
6. Ada tokoh formal masyarakat yang bersedia untuk menggerakkan masyarakat.

BAB IV

PROSEDUR PEMILIHAN LOKASI

4.1. Tata Cara Pengusulan Lokasi

Tata cara pengusulan lokasi DBM adalah sebagai berikut:

1. Pemda membuat daftar seluruh calon lokasi Drainase Berbasis Masyarakat (DBM) sesuai dengan hasil analisis peta genangan dan juga sekaligus mempertimbangkan usulan dari masyarakat.
2. Sosialisasi program Drainase Berbasis Masyarakat (DBM) dilakukan kepada Camat, Lurah, RW dan RT yang masuk ke dalam daftar calon lokasi melalui sebuah pertemuan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
3. Masyarakat (RW/RT) membuat proposal/usulan penanganan drainase kepada Pemda, c.q. dinas penanggungjawab, diketahui oleh lurah dan camat dengan difasilitasi oleh TFL. (*lihat lampiran 1 : Format proposal/usulan*).
4. Pemda melakukan *review/kajian* proposal/usulan disesuaikan dengan dokumen Masterplan Drainase dan/atau dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK), dan/atau dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk mengetahui skala prioritas penanganan drainase kabupaten/kota.
5. TFL Teknis dan Pemberdayaan bersama SKPD melakukan survey kelayakan teknis dan kelayakan sosial.
6. Berdasarkan skala prioritas penanganan drainase kabupaten/kota dan hasil survey kelayakan teknis dan sosial, Pemda menentukan minimal 2 (dua) calon lokasi, jika rencana program DBM hanya cukup untuk 1 (satu) lokasi. Jumlah tersebut dapat ditambah kelipatan dua berdasarkan jumlah lokasi yang direncanakan oleh Pemda.
7. Surat pemberitahuan hasil penentuan calon lokasi (pra-seleksi) dikirimkan kepada masyarakat.

4.2. Tata Cara Seleksi Lokasi

Seleksi lokasi akan dilakukan dengan metode *Community Self-selection Stakeholders Meeting (CSSM)* dimana wakil masyarakat yang lolos pra-seleksi akan diundang ke sebuah pertemuan, yang disebut pertemuan masyarakat untuk seleksi sendiri. CSSM dilakukan agar masyarakat dapat mengukur kemampuannya sendiri dan menentukan sendiri lokasi yang paling siap untuk menerima program sesuai dengan prinsip *Demand Responsive Approach (DRA)*. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pemda, c.q. dinas penanggungjawab membuat surat undangan kepada masyarakat yang lolos pra-seleksi untuk mengikuti pertemuan seleksi lokasi/masyarakat, dengan tembusan surat dikirimkan kepada camat dan lurah.
2. Setiap kelompok masyarakat diwakili oleh sekurang-kurangnya antara 10 – 15 orang, termasuk tokoh formal dan informal, kelompok ibu-ibu dan pemuda.
3. Pertemuan difasilitasi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Pemberdayaan Masyarakat dan dibantu oleh TFL Teknis.
4. Proses pertemuan dilakukan sesuai dengan Buku Panduan *Community Self-selection Stakeholders Meeting (CSSM)* (lihat lampiran 2).
5. Setelah selesai pertemuan seleksi, dibuat Berita Acara Seleksi Lokasi. Dokumen Berita Acara Seleksi Lokasi ditandatangani oleh 1 (satu) orang wakil masyarakat dari masing-masing lokasi dan diketahui oleh wakil dari pemda dan TFL. (lihat lampiran 3 : Contoh dokumen Berita Acara Seleksi sebagaimana).
6. Dokumen Berita Acara Seleksi Lokasi sekaligus sebagai laporan kepada Pemda, c.q. dinas penanggungjawab.
7. Pemda mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang penentuan lokasi DBM, dan rekomendasi hasil Kajian Drainase Bangunan (KDB) untuk keperluan penyusunan system dan desain drainase.

LAMPIRAN-1:

**PROPOSAL/USULAN MASYARAKAT
UNTUK PERBAIKAN DRAINASE**

1. Lokasi :
2. RT/RW, :
Dusun/Kampung
3. Desa/Kelurahan :
4. Kecamatan :
5. Kabupaten/Kota :
6. Propinsi :
7. Masalah genangan : 1.
yang dihadapi 2.
3. Dst
8. Luas genangan :m²
9. Lama genangan : Jam
10. Wilayah tergenang : RT....., RT, RT, RT, dst
11. Jumlah KK :KK
12. Jumlah jiwa :jiwa,laki-laki,perempuan,
.....anak-anak
13. Jenis pekerjaan yang : 1.
diusulkan 2.
3. Dst
14. Jumlah biaya yang : Rp
diusulkan (.....)
15. Swadaya masyarakat : Rp
(.....)

.....2013

Mengetahui: Lurah/Kepala Desa

LAMPIRAN-2:

PANDUAN PELAKSANAAN COMMUNITY SELF-SELECTION STAKEHOLDERS MEETING (CSSM)

Latar Belakang

CSSM adalah singkatan dari *Community Self-selection Stakeholders Meeting* atau pertemuan masyarakat untuk seleksi sendiri. CSSM dilakukan dengan pendekatan partisipatif, dimana masyarakat sendiri yang akan menentukan lokasi program infrastruktur sesuai dengan tingkat masalah yang dihadapi serta kemauan dan kemampuan masyarakat sendiri.

Metode ini dikembangkan berdasarkan prinsip *Demand Responsive Approach* (DRA) atau pendekatan tanggap terhadap kebutuhan. Kebutuhan (*demand*), diartikan sebagai kebutuhan yang diikuti dengan kemauan untuk “berkorban”, berkontribusi. Tidak sekedar kebutuhan yang hanya dilandasi oleh keinginan saja, yang tidak diikuti oleh kemauan untuk mengeluarkan biaya. Metode ini juga sesuai dengan prinsip perencanaan dari bawah (*bottom up approach*) dimana masyarakat dapat terlibat dari sejak awal program, termasuk penentuan lokasi.

Pendekatan seperti ini tepat untuk menjawab berbagai permasalahan pembangunan infrastruktur yang pola seleksi lokasinya sama sekali tidak memperhatikan aspirasi bawah, gagasan, keinginan dan kehendak masyarakat yang *notabene* akan menjadi lokasi sekaligus pengguna sarana. Akibatnya banyak sarana dan prasarana yang dibangun dengan biaya yang cukup mahal kemudian mangkrak, tidak digunakan, dan masyarakat tidak mau mengelola karena sarana tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.

Berdasarkan kondisi seperti itulah, maka CSSM disusun sebagai panduan bagi para fasilitator pengembangan masyarakat untuk pembangunan infrastruktur agar tumbuh rasa memiliki, *sense of belonging*, masyarakat terhadap sarana dan prasarana yang dibangun. Dengan begitu, sarana yang dibangun akan dapat lebih berkelanjutan, *sustainable*.

Tujuan

1. Mengajak seluruh stakeholders masyarakat untuk secara bersama-sama mengidentifikasi masalah dan potensi yang dimilikinya
2. Menyusun kriteria bersama untuk menentukan lokasi yang paling siap implementasi program pembangunan infrastruktur
3. Melakukan penghitungan potensi yang dimiliki dengan sistim skore dan menentukan lokasi yang dinilai paling siap untuk menerima program
4. Membuat berita acara seleksi lokasi

Waktu

Waktu yang dibutuhkan kurang-lebih 3 jam (maksimal).

Peserta

1. Wakil masyarakat yang telah lolos pra-seleksi, dan masing-masing kelompok masyarakat atau wilayah diwakili oleh sekitar 10 – 15 orang terdiri dari RT, RW, Lurah, LPMK, tokoh masyarakat, wakil masyarakat baik bapak-bapak maupun ibu-ibu dan pemuda.
2. Wakil pemerintah kabupaten/kota, minimal dari dinas penanggungjawab
3. Tenaga Fasilitator Lapangan/TFL Pemberdayaan Masyarakat dan TFL Teknis, serta
4. Warga lain yang berminat sebagai pengamat

Alat yang Diperlukan

1. Ruang aula yang cukup luas (minimal 50 peserta) dan terang dengan dinding yang dapat ditempel
2. Meja & kursi (jika diperlukan), atau sebaiknya tikar
3. Alat tulis: kertas plano, lakban, lem, gunting, spidol warna
4. Bahan-bahan promotion atau sosialisasi program
5. Draft berita acara seleksi lokasi

Moderator

1. TFL Pemberdayaan (moderator utama)
2. TFL teknis (moderator pendamping)

Proses

1. Pertemuan CSSM dilaksanakan dengan cara lebih formal karena semua stakeholders diundang untuk hadir, dan dapat menggunakan MC agar urutan acara bisa berjalan lebih jelas dan teratur
2. Sambutan dari wakil pemerintah daerah sekaligus penjelasan tentang tujuan pertemuan
3. Fasilitator bertugas untuk membuat suasana menjadi cair agar peserta lebih relax dan merasa nyaman
4. Jika suasana sudah cair, fasilitator sebaiknya mulai menjelaskan tata cara dan urutan kegiatan yang akan dilakukan dalam proses CSSM.
5. Peserta diminta untuk berkumpul sesuai lokasi/kampung asalnya.
6. Kepada setiap kelompok masyarakat diberikan alat, antara lain: kertas plano, spidol, lakban, lem, untuk menggambarkandan mendeskripsikan potret masalah genangan yang ada di wilayahnya dan potensi yang dimiliki masyarakat untuk menangani masalah genangan tersebut. Waktu yang diberikan maksimal selama 60 menit.
7. Minta setiap kelompok untuk menggambarkan peta genangan (peta sederhana, tanpa skala) yang terjadi di lingkungannya sebagaimana diusulkan dalam proposal masyarakat.
8. Jika tiap kelompok masyarakat sudah selesai mengerjakan, kemudian fasilitator menjelaskan carapenilaian terhadap kondisi yang ada di wilayah masing-masing.
9. Setelah semua penilaian di tiap kelompok selesai, kemudian peserta diajak untuk menyusun kriteria bersama, terutama untuk mengantisipasi jika ada dua atau lebih kampung yang memiliki jumlah nilai yang sama.
10. Presentasi hasil identifikasi masalah dan potensi oleh masing-masing wakil kampung.
11. Penghitungan nilai hasil skoring dengan cara memasukkan nilai setiap teknik ke dalam tabel yang telah disediakan oleh fasilitator. Nilai tersebut kemudian dihitung sesuai dengan bobot masing-masing. Semua proses penghitungan dilakukan secara bersama-sama dan terbuka dari masing-masing kampung.

12. Langkah selanjutnya adalah menjumlahkan nilai sehingga diperoleh total nilai masing-masing kampung.
13. Total nilai masing-masing kampung akan dibandingkan dengan total nilai dari kampung yang lain. Kampung yang memperoleh nilai tertinggi adalah kampung yang paling siap untuk implementasi program.
14. Penandatanganan berita acara pelaksanaan seleksi masyarakat yang ditandatangani oleh semua wakil stakeholders.

Hasil Akhir

Hasil akhir dari pertemuan ini adalah berupa tabel isian sebagai hasil analisis masalah dan potensi yang diidentifikasi oleh masing-masing kelompok masyarakat, sebagai berikut:

No.	Indikator	Nilai	Bobot	Score
1.	Kelayakan teknis:		30%	
	a. Luas wilayah genangan			
	b. Tinggi genangan			
	c. Lama genangan			
	d. Sarana pengolahan limbah tinja dan sampah			
	e. Lahan untuk membangun sarana dan prasarana drainase			
	f. Saluran sub-sistem penampung limpasan air			
	g. Jumlah warga yang menderita akibat genangan			
2.	Kemauan masyarakat membayar kontribusi		30%	

3.	Kapasitas kelembagaan masyarakat		15%	
4.	Kesiapan tokoh masyarakat		10%	
5.	Pengalaman Keswadayaan masyarakat		10%	
6.	Prioritas penanganan masalah		5%	
JUMLAH			100%	

Cara Pengisian

Cara mengisi atau menggunakan tabel penilaian adalah sebagai berikut:

1. Nilai yang digunakan adalah skala 1 (satu) sampai 10 (sepuluh).
2. Semakin tinggi tingkat keyakan teknisnya, semakin besar kemauan masyarakat untuk berkontribusi, semakin siap kelembagaan masyarakatnya, semakin siap tokoh masyarakatnya untuk menggerakkan warga, semakin banyak pengalaman keswadayaan yang pernah dilakukan serta semakin besar prioritas genangan untuk pecahkan maka semakin tinggi nilai yang diperoleh.
3. Untuk kelayakan teknis: jumlahkan hasil penilaian a, b, c, d, e, f dan g kemudian dibagi 7 (jumlah pembagi).
4. Jika sudah selesai semua penilaian, kemudian masing-masing dikalikan dengan bobot dan hasilnya diisikan kedalam kolom score.
5. Jumlahkan seluruh skor.

LAMPIRAN-3:

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PROSES SELEKSI LOKASI
DRAINASE BERBASIS MASYARAKAT (DBM)**

Pada hari....., tanggal bulan....., tahunbertempat di Yang beralamat di jalan telah dilaksanakan proses seleksi lokasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan program Drainase Berbasis Masyarakat (DBM). Seluruh proses seleksi telah dilaksanakan secara fair, transparan dan demokratis oleh masyarakat sendiri.

Seleksi lokasi telah diikuti oleh (....) kampung, yaitu:

1. Kampungdengan perolehan skor
2. Kampungdengan perolehan skor.....
3. Kampungdengan perolehan skor

Sesuai dengan hasil skor yang berhasil dikumpulkan oleh masing-masing kampung maka telah disepakati bersama bahwa kampung yang paling siap untuk melaksanakan program Drainase Berbasis Masyarakat (DBM) adalah kampung.....

Demikian Berita Acara Seleksi Lokasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

.....
Wakil Kampung Wakil Kampung Wakil Kampung

Mengetahui: seluruh stakeholder yang hadir

